

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Jerman dan Turki memiliki keterkaitan sejarah yang kuat. Jerman dan Turki menjalin hubungan yang dekat dan luas sebagai sekutu sejak Perang Dunia ke I. Pada saat itu Kekaisaran Jerman dan Turki Usmani adalah sekutu yang sama-sama bernaung di bawah Blok Sentral, dimana mereka menghadapi Blok Entente yang beranggotakan Inggris, Prancis, dan Russia. Pada masa berkuasanya NAZI, Turki membantu para pengungsi Jerman untuk berlindung dari kekejaman tentara NAZI (Siagian, Januari 2018). Dan setelah Perang Dunia II berakhir dan Hitler telah dikalahkan, Turki juga membantu Jerman membangun perekonomiannya yang porak poranda sampai keadaannya berangsur membaik.

Kemudian di era modern, dua negara anggota NATO itu telah mengembangkan berbagai kemitraan yang semakin erat. Di tandai dengan 2,6 juta warga Turki yang hidup di Jerman, dimana kebanyakan dari mereka datang sebagai “pekerja tamu” mulai tahun 1960-an (Simsek, 2016). Karena isu dan masalah terkait diaspora Turki yang telah lama mendominasi, hubungan bilateral antara Turki dan Jerman semakin berkembang dari yang hanya terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, kini mulai menjalin kerjasama dalam ranah politik internasional. Hal itu menjadi faktor penting dalam agenda bilateral kedua negara (Hakim, 2017).

Pada tahun 2011, Jerman adalah mitra dagang terbesar dan juga merupakan investor asing terpenting di Turki. Selain itu, Jerman juga menyumbang pendapatan pariwisata terbesar bagi Turki. Hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Turki, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat hingga mencapai 31,4

Euro dan membawa Turki masuk sebagai kelompok 15 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut menunjukkan transformasi hubungan ekonomi. Kemudian pada tahun 2012, Jerman juga mengadakan acara resmi untuk kedua negara guna memperingati 50 tahun berjalannya program bantuan pembangunan yang dijalankan Jerman untuk turut membantu proses pembangunan di negara Turki. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang terjalin sangat baik. Bahkan Kementerian untuk Kerjasama dan Pembangunan Jerman mengumumkan bahwa Turki merupakan mitra kerjasama yang penting bagi negara tersebut, sehingga pemberian berbagai bantuan pantas diberikan kepada Turki.

Selanjutnya pada tahun 2016, Jerman menjalin kerjasama dengan Turki dalam upaya menanggulangi permasalahan pengungsi yang datang dari timur tengah (terutama dari Suriah) agar tidak masuk ke wilayah Eropa terkhusus Jerman dengan menawarkan bantuan finansial kepada Turki. Kerjasama tersebut berjalan dengan efektif, terbukti sekitar 2 juta pengungsi Suriah dapat ditanggulangi oleh Turki sehingga tidak merambah masuk ke wilayah Jerman (Rofli, 2017). Hal tersebut menunjukan hubungan di bidang keamanan terjalin cukup kuat diantara mereka.

Namun pada Juli 2016, secara mengejutkan Menteri Luar Negeri Jerman menyatakan mengimbau warga negaranya untuk tidak bepergian ke Turki melalui kebijakan *Travel Warning*. *Travel Warning* merupakan imbauan atau larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di suatu negara agar warganya tidak melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Risiko membahayakan nyawa dan keselamatan menjadi alasan larangan ini. Adapun hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan *Travel Warning* adalah sebagai berikut:

- Kondisi pemerintahan suatu negara yang sedang tidak stabil.

- Memburuknya hubungan kedua negara atau beberapa negara sekaligus dalam suatu regional.
- Adanya kasus kejahatan (berbahaya) yang sedang berlangsung.
- Terjadi serangan teroris di negara yang bersangkutan.

Pada 15 Juli 2016, Jerman mengeluarkan kebijakan tersebut untuk menanggapi kerusuhan yang diakibatkan oleh aksi usaha kudeta di Turki, bertujuan untuk melindungi warga negara Jerman agar tidak terdampak kerusuhan di Turki. Kemudian pada tahun 2017, kebijakan *Travel Warning* kembali di pertegas oleh Jerman setelah Turki menangkap seorang aktivis HAM bernama Peter Steudner dan sejumlah wartawan Jerman. Mereka dituduh telah menulis suatu artikel yang mengkritik Presiden Recep Tayyib Erdogan sehingga menambah keruh permasalahan di Turki. Hal tersebut berdampak cukup besar terhadap hubungan kedua negara tersebut. Dimana hubungan kedua negara menjadi tidak stabil dan menjadi sering berselisih.

Hal yang menarik disini adalah kedua negara baik Jerman maupun Turki mempunyai hubungan yang saling membutuhkan. Dimana Jerman membutuhkan Turki sebagai mitra ekonomi dan mitra pertahanan untuk menanggulangi masalah pengungsi yang datang dari Timur Tengah. Disisi lain Turki juga membutuhkan Jerman sebagai mitra ekonomi melalui pariwisata, yang dimana warga negara Jerman merupakan pengunjung yang memberikan pemasukan terbesar setiap tahunnya untuk negara tersebut. Sehingga kebijakan *Travel Warning* yang di berlakukan Jerman berdampak bagi kedua negara terutama Turki yang menjadi objek dari kebijakan Jerman tersebut (Aipassa, 2017). Dari penjelasan di atas penulis akan membahas mengenai bagaimana Turki merespon penerapan kebijakan *Travel Warning* yang diterapkan oleh Jerman terhadap Turki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian, yaitu:

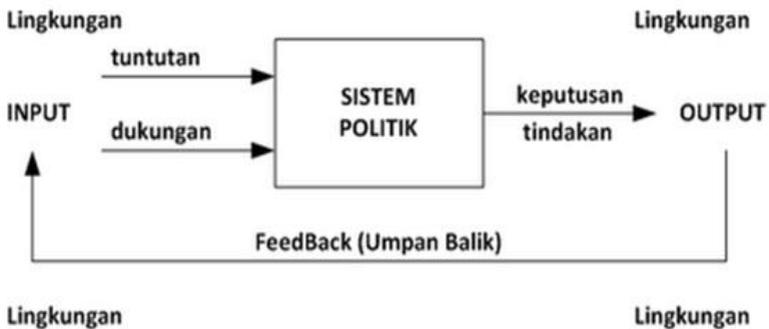
“Bagaimana respon Turki terhadap kebijakan *Travel Warning* yang diterapkan oleh Jerman terhadap Turki tahun 2016-2019?”

C. Kerangka Pemikiran

Dampak Politik Luar Negeri

Menurut David Easton ada yang dinamakan sebuah masukan dan keluaran dari sistem yang tercermin dari penampungan tuntutan (INPUT), proses pembuatan keputusan, dan keputusan-keputusan yang dibuat (OUTPUT) di dalam suatu sistem politik. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal dalam menganalisa sistem politik. Rumusan tersebut terdiri dari: input – sistem atau proses politik – output (Easton, 1988). Hubungan antar komponen tersebut dapat digambarkan melalui skema berikut ini.

Skema 1.1 Kerja Sistem Politik David Easton



Dari skema diatas, David Easton menjelaskan bagaimana proses pembentukan suatu kebijakan. Diawali dengan

penampungannya tuntutan-tuntutan yang datang dari masyarakat, Tuntutan tersebut kemudian didukung oleh berbagai pihak seperti dukungan dari politik domestik di suatu negara, itulah yang disebut sebagai proses INPUT. Selanjutnya tuntutan-tuntutan tersebut diproses melalui struktur sistem politik dan dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas menjalankan sistem tersebut, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Setelah tuntutan diproses di dalam sistem politik maka akan menghasilkan suatu kebijakan yang akan diterapkan pada masyarakat, kebijakan inilah yang disebut dengan OUTPUT. Kebijakan sebagai hasil dari OUTPUT pasti akan memiliki dampak setelah diterapkan, dan akan memunculkan efek timbal balik (*feedback*) yang kembali lagi menjadi sebuah INPUT.

Proses berlangsungnya suatu *feedback*, tentu tidak terlepas dari variabel lingkungan. Lingkungan yang dimaksudkan disini bisa berupa lingkungan yang berada dari dalam sistem itu sendiri, maupun lingkungan yang berada di luar sistem. Lingkungan dalam suatu sistem bisa berupa suatu tekanan atau bahkan gangguan (Easton, 1988). Suatu sistem selalu terkait dengan keadaan dimana bagiannya satu sama lain bergantung secara fungsional, yang mempunyai batas-batas tertentu tapi merupakan komponen dari suatu keutuhan yang bulat. Jika salah satu komponen itu berubah maka bagian-bagian lainnya pasti berubah. Dengan perkataan lain, dengan suatu variabel dalam sebuah sistem politik mengalami perubahan kualitas dan kuantitas, maka yang lain juga akan mengalami perubahan yang sama, walaupun dalam kadar yang berbeda. Di samping itu, akibat tekanan lingkungan, maka sistem juga akan berubah penampilannya hingga bagian yang mengalami tekanan itu kembali dalam kondisi semula.

David Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara menyeluruh, karena bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya menerapkan suatu nilai-nilai kepada masyarakat secara otoritatif. Seperti halnya dalam proses pembentukan kebijakan, penerapan kebijakan hanya dapat

dilakukan oleh lembaga yang memiliki suatu kewenangan legitimate (otoritatif) di mata negara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan sebuah keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mencapai kepentingannya.

RESPON TURKI TERHADAP KEBIJAKAN TRAVEL WARNING YANG DITERAPKAN OLEH JERMAN

Pada 28 Agustus 2016 pemerintah Turki menyatakan mengeluarkan kebijakan *Travel Warning* kepada warga negaranya untuk tidak mengunjungi Jerman guna merespon kebijakan *Travel Warning* yang telah diterapkan Jerman terhadap Turki sebelumnya (Nursyahbani, 2017).

Proses pengambilan kebijakan Turki hingga mengeluarkan kebijakan *Travel Warning* terhadap Jerman dapat digambarkan melalui skema berikut.

Skema 1.2 Kerja Sistem Politik Turki



Kebijakan Jerman yang melarang warga negaranya untuk tidak mengunjungi Turki untuk berwisata ataupun untuk

kepentingan lain. Di lain sisi Turki menuduh Jerman ikut andil dalam upaya kudeta yang terjadi di Turki dengan alasan banyaknya masyarakat Jerman di Turki yang membuat artikel yang mengkritik kinerja Erdogan, diantara kritikan-kritikan tersebut terdapat kritikan yang dibuat oleh para pengusaha Jerman yang ada di Turki,.hal tersebut disampaikan oleh Akrim Immamoglu dari Partai Rakyat Republik dan menuntut pemerintah untuk mengambil sikap tegas (Administrator, 2016). Tuntutan tersebut kemudian masuk sebagai tuntutan (Input). Tuntutan tersebut kemudian diproses oleh pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri Turki dan menghasilkan keputusan berupa penerapan kebijakan *Travel Warning* ke Jerman sebagai Output.

Kemudian pada tahun 2017, Jerman mengeluarkan *Travel warning* kembali ke pada Turki, setelah Turki menangkap aktivis HAM di Turki yang bernama Peter Steudner dan seorang jurnalis bernama Deniz Yucel yang dituduh sebagai salah satu orang yang menyebarkan informasi negatif dan membuat keadaan Turki saat peristiwa kudeta semakin mengeruh. Turki menyadari bahwa penangkapan tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi memanas, hal tersebut disampaikan langsung oleh menteri luar negeri Turki, Ahmed Dovutoglu yang mendapatkan laporan dari kantor besar Turki di Jerman di beberapa daerah yang mengaku mendapat banyak protes dari masyarakat Jerman atas penangkapan Peter Steudner dan Deniz Yucel yang dianggap mereka tidak beralasan dan kurang Bukti. Akhirnya Turki memutuskan untuk kembali mengeluarkan kebijakan *Travel Warning* untuk menghindari kemungkinan warga negaranya ditangkap oleh otoritas Jerman seperti yang dilakukan Turki pada Peter Steudner dan untuk menghindari kemungkinan penangkapan warga Turki atas tuduhan “terror” serta untuk menghindari rasisme serta xenophobia terhadap warga negara Turki sebagai dampak peristiwa kudeta yang terjadi pada tahun 2016 di Turki (Nursyahbani, 2017).

D. Hipotesa

Dari penjelasan teori diatas, Penulis memberikan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang di kemukakan di atas. Yaitu:

Respon Turki terhadap kebijakan *Travel Warning* yang diterapkan oleh Jerman terhadap Turki pada tahun 2016-2019 adalah dengan menerapkan kebijakan *Travel Warning* kepada warga negaranya untuk tidak mengunjungi Jerman dikarenakan hubungan kedua negara semakin memanas sebagai dampak dari peristiwa kudeta Turki yang meninggalkan banyak permasalahan yang juga menjadi alasan utama Jerman mengeluarkan *Travel Warning* kepada Turki. *Travel Warning* juga di terapkan oleh Turki kepada Jerman untuk melindungi warga negaranya dari kemungkinan ditangkap oleh otoritas Jerman seperti penangkapan yang dilakukan otoritas Turki terhadap seorang aktivis HAM Jerman yang bernama Peter Steudner dan Jurnalis Jerman bernama Deniz Yucel serta untuk menghindari kemungkinan penangkapan warga Turki atas tuduhan “terror” serta untuk menghindari rasisme atau xenophobia terhadap warga negara Turki sebagai dampak peristiwa kudeta yang terjadi pada tahun 2016.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah:

- Untuk menjelaskan mengenai bagaimana Turki merespon kebijakan *Travel Warning* yang diterapkan oleh Jerman pada tahun 2016-2019

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian dibutuhkan guna menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan untuk membantu pembuktian hipotesa serta pokok

permasalahan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembatasan pada penelitian dimaksudkan agar objek penelitian dapat lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis membatasi kajian pada respon Turki terhadap kebijakan *Travel Warning* yang diberlakukan pemerintah Jerman terhadap Turki dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Sementara itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang tersusun secara langsung dari pihak terkait seperti dari hasil wawancara atau dari website resmi pihak yang bersangkutan. Dan data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi

ilmiah, laporan media, dan data dari website resmi pemerintah yang bersangkutan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa BAB guna mempermudah penyusunan bahasan dan uraian-uraian.

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang, Rumusan masalah, Kerangka pemikiran, Hipotesa, Tujuan penelitian, Metodologi, Sistematika penulisan.

BAB II

HUBUNGAN JERMAN DAN TURKI

Berisi mengenai pembahasan lebih mendalam mengenai hubungan antara kedua negara.

BAB III

ANCAMAN KESELAMATAN WARGA JERMAN DI TURKI PASKA KUDETA DAN SIKAP TEGAS JERMAN MEMBERLAKUKAN *TRAVEL WARNING* TERHADAP TURKI

Berisi mengenai kondisi Turki paska kudeta beserta ancaman keselamatan yang warga Jerman dapatkan apabila berada di Turki. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kebijakan *Travel Warning* dan proses pengambilan keputusan Jerman untuk memberlakukan *Travel Warning* kepada Turki.

BAB IV

RESPON TURKI TERHADAP KEBIJAKAN *TRAVEL WARNING* YANG DITERAPKAN OLEH JERMAN PADA TAHUN 2016-2019

Berisi penjelasan mengenai respon Turki terhadap kebijakan *Travel Warning* yang diterapkan oleh Jerman pada tahun 2016-2019

BAB V

KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan BAB-BAB sebelumnya.